

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode 2020–2030 menjadi fase bonus demografi bagi Indonesia, yaitu kondisi ketika komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) (Arum *et al.*, 2023). Perubahan struktur demografi ini merupakan hasil dari penurunan angka kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Bonus demografi merupakan salah satu fenomena yang jarang atau bahkan tidak terjadi di suatu negara. Indonesia diperkirakan terjadi bonus demografi tepat 100 tahun setelah kemerdekaan 1945 (Qomariyah *et al.*, 2023). Bonus demografi menuntut peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang mampu mengarahkan potensi penduduk usia produktif menjadi modal pembangunan yang produktif. Tanpa intervensi kebijakan yang terencana dan terkoordinasi, peningkatan jumlah angkatan kerja justru berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sistem pelayanan publik dan memperbesar permasalahan sosial ekonomi (Sagara *et al.*, 2025).

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebagai dampak bonus demografi menyebabkan bertambahnya pasokan tenaga kerja di pasar kerja. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap sistem ketenagakerjaan, khususnya apabila pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak dapat mengimbangi peningkatan angkatan kerja. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadi salah satu faktor struktural yang mendorong meningkatnya pengangguran

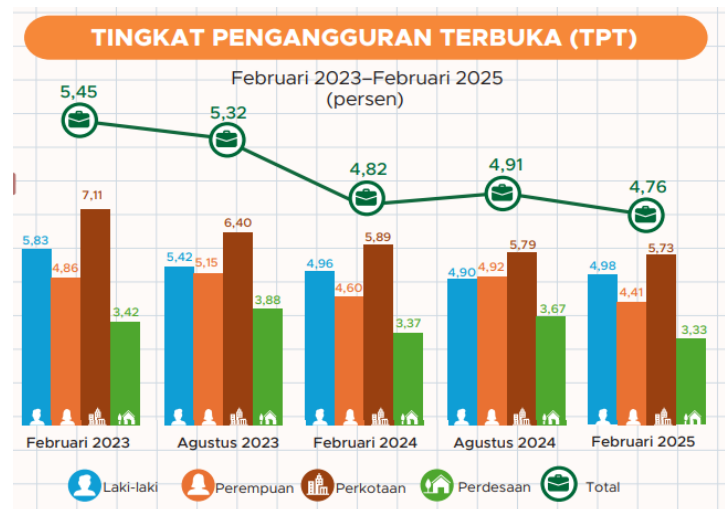
di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, terdapat dua jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Menurut BPS Pengangguran terbuka menggambarkan kondisi individu yang belum memiliki pekerjaan namun aktif mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha (Mustakim et al., 2022). Sementara itu, pengangguran tertutup merujuk pada individu yang sebenarnya sudah bekerja, tetapi pemanfaatan tenaga kerjanya belum optimal, seperti bekerja di bawah jam kerja normal dibawah 35 jam selama satu minggu (Qamariyah et al., 2022). Dengan demikian, kedua jenis pengangguran ini sama-sama mencerminkan permasalahan dalam pasar kerja, baik dari sisi keterbatasan kesempatan kerja maupun kurang efisiennya penyerapan tenaga kerja.

Tekanan terhadap sistem ketenagakerjaan terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari tahun 2025 berada pada angka 4,76%. Walaupun angka ini mengalami penurunan 0,06% dibanding Februari 2024, namun pengangguran tetap menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan, terutama karena dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Pengangguran yaitu merujuk pada penduduk berusia lima belas tahun ke atas yang tidak bekerja termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, merintis usaha, telah mendapatkan pekerjaan namun belum memulai aktivitas kerja, serta yang menghentikan pencarian kerja karena merasa tidak ada kesempatan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Menurut Jalil dalam *Surindra et al.*, (2021) pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya ada tujuh. Pertama, pengangguran terbuka adalah ketika

seseorang yang belum memiliki pekerjaan atau memilih untuk tidak bekerja. Kedua, pengangguran terselubung muncul akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja yang menyebabkan potensi kerjanya belum dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, pengangguran siklikal berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Keempat, pengangguran struktural timbul karena tidak adanya keselarasan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Kelima, pengangguran friksional disebabkan oleh hambatan dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Keenam, pengangguran teknologi timbul akibat kemajuan teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia. Ketujuh, pengangguran musiman muncul karena adanya perubahan waktu, siklus kegiatan ekonomi, atau pergantian musim tertentu.

Pengangguran yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengangguran terbuka karena menurut Kuncoro dalam Ardian *et al.*, (2021) berpendapat bahwa pengangguran terbuka merupakan permasalahan ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi manusia serta termasuk dalam kategori masalah yang paling krusial. Adapun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui proporsi angkatan kerja yang belum terakomodasi dalam dunia kerja yang terjadi karena adanya lonjakan sumber daya manusia pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada (Ashari & Athoillah, 2023).



Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia
 Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Gambar 1.1 menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional dalam periode Februari 2023 hingga Februari 2025 menunjukkan tren cenderung menurun meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2024 bulan Agustus pengangguran di Indonesia sebanyak 7.465.599 juta dengan Angkatan kerja sebanyak 152.048.859 juta (Badan Pusat Statistik, 2025). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka TPT dengan gender perempuan konsisten lebih tinggi apabila disejajarkan dengan jenis kelamin laki-laki. Menurut Sitorus dalam (Sari & Suryani, 2023) ketimpangan gender masih menjadi persoalan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, tercermin dari belum meratanya manfaat hasil pembangunan yang diterima perempuan dibandingkan laki-laki, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ditinjau dari wilayah tempat tinggal, penduduk perkotaan juga memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pemusatan aktivitas ekonomi di perkotaan mendorong arus migrasi penduduk dari desa ke kota. Ketika jumlah pendatang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, terjadi

surplus tenaga kerja yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah perkotaan (Dwi, 2024).

Tabel 1. 1 TPT menurut Pendidikan Terakhir di Indonesia

Tingkat Pendidikan	Februari 2024 (presentase)	Februari 2025 (presentase)
SD ke Bawah	2,38	2,32
SMP	4,28	4,35
SMA	6,73	6,35
SMK	8,62	8
Diploma I/II/III	4,87	4,84
Diploma IV, S1, S2, S3	5,63	6,23

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Tabel 1.1 menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan pendidikan terakhir mengalami naik turun. Tahun 2025 dapat dikatakan bahwa lulusan SMK memegang TPT urutan pertama dan urutan terakhir adalah lulusan SD ke bawah. Pengangguran di Indonesia menunjukkan fenomena yang menarik. Lulusan dengan Dominasi tertinggi dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih ditempati oleh lulusan SMK, sementara lulusan SMA dan perguruan tinggi berada pada urutan berikutnya. Fakta ini menimbulkan kontradiksi karena semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang seharusnya memberikan peluang kerja yang lebih luas, namun kenyataannya justru menjadi penyumbang signifikan terhadap angka pengangguran karena tidak dibarengi dengan keterampilan. Fenomena tersebut sering disebut sebagai pengangguran terdidik (*educated unemployment*), yaitu kondisi ketika individu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau pendidikan tinggi tidak segera terserap ke dalam pasar kerja (Sudarmi et al., 2020).

Penanganan pengangguran di Indonesia juga memiliki landasan normatif yang diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki hak serta peluang yang setara untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Undang-undang ini juga menugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan perumusan rencana tenaga kerja, pengembangan melalui pelatihan, serta penempatan tenaga kerja di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.

Sebagai wilayah yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur juga mengalami persoalan yang sama. Berdasarkan data BPS tahun 2025, TPT Jawa Timur mencapai angka sebesar 3,61%. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur berhasil dalam menekan angka pengangguran karena penurunan tersebut menjadi paling signifikan di Pulau Jawa (Mazaya, 2025). Namun demikian, di beberapa kabupaten atau kota masih ditemukan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah, serta perlunya perhatian khusus pada daerah yang menghadapi permasalahan pengangguran lebih serius.

Tabel 1. 2 TPT menurut Kabupaten atau Kota (persen) di Jawa Timur Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sidoarjo	10,97	10,87	8,80	8,05	6,49
Gresik	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45
Kota Malang	9,61	9,65	7,66	6,80	6,10

Bangkalan	8,77	8,07	8,05	6,18	5,35
Kabupaten Malang	5,49	5,40	6,57	5,70	5,13
Pacitan	2,28	2,04	3,65	1,83	1,56
Ponorogo	4,45	4,38	5,51	4,66	4,19
Trenggalek	4,11	3,53	5,37	4,52	3,90
Tulungagung	4,61	4,91	6,65	5,65	4,12
Blitar	3,82	3,66	5,45	4,91	4,77
Kediri	5,24	5,15	6,83	5,79	5,10
Lumajang	3,36	3,51	4,97	3,67	3,28
Jember	5,12	5,44	4,06	4,01	3,23
Banyuwangi	5,34	5,42	5,26	4,75	4,03
Bondowoso	4,13	4,46	4,32	4,15	3,63
Situbondo	3,85	3,68	3,38	3,27	3,15
Probolinggo	4,86	4,55	3,25	3,24	3,00
Pasuruan	6,24	6,03	5,91	5,48	5,02
Mojokerto	5,75	5,54	4,83	4,67	3,87
Jombang	7,48	7,09	5,47	4,66	3,75
Nganjuk	4,80	4,98	4,74	4,68	3,87
Madiun	4,80	4,99	5,84	5,14	4,34
Magetan	3,74	3,86	4,33	4,16	3,28
Ngawi	5,44	4,25	2,48	2,41	2,40
Bojonegoro	4,92	4,82	4,69	4,63	4,42
Tuban	4,81	4,68	4,54	4,40	4,28
Lamongan	5,13	4,90	6,05	5,46	4,34
Sampang	3,35	3,45	3,11	2,72	2,50
Pamekasan	3,49	3,10	1,40	1,74	1,64
Sumenep	2,84	2,31	1,36	1,71	1,69
Kota Kediri	6,21	6,37	4,38	4,06	3,91
Kota Blitar	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
Kota Probolinggo	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
Kota Pasuruan	6,33	6,23	6,18	5,64	4,63
Kota Mojokerto	6,74	6,87	5,05	4,73	3,76
Kota Madiun	8,32	8,15	6,39	5,85	4,30
Kota Surabaya	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
Kota Batu	5,93	6,57	8,43	4,52	3,63
Provinsi Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19

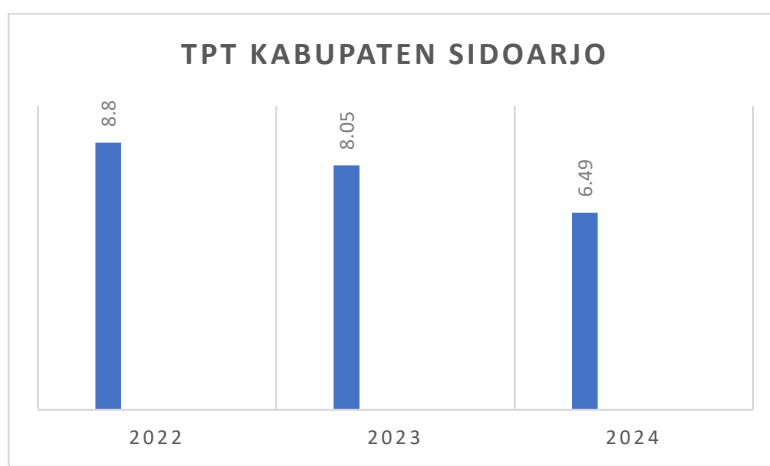
Sumber : (BPS Jawa Timur, 2024)

Berdasarkan tabel 1.2 kota atau kabupaten di Jawa Timur yang memiliki TPT paling tinggi pada tahun 2024 adalah Sidoarjo yang menempati urutan pertama dari 38 kota atau di Jawa Timur (Fahmi, 2025). Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2024 TPT Kabupaten atau Kota tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024 presentase TPT Sidoarjo 6,49% disusul dengan Gresik dengan presentase TPT 6,45%, presentase TPT kota malang 6,10%, presentase TPT Bangkalan 5,35% dan Kabupaten Malang dengan presentase TPT sebesar 5,13%. Penelitian ini menjadikan Sidoarjo sebagai wilayah yang menjadi fokus kajian.

Gresik menjadi contoh daerah tetangga Kabupaten Sidoarjo yang memiliki TPT tertinggi kedua. Kabupaten Gresik menyadari bahwa TPT di daerah tersebut termasuk tinggi padahal daerah industri. Hal tersebut karena adanya Covid-19 yang membuat lonjakan TPT di Gresik meningkat (Adinda & Asmara, 2024). Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk menghadapi permasalahan tersebut untuk menurunkan tingkat TPT dari tahun ke tahun adalah dengan membuat kebijakan untuk meningkatkan SDM melalui penguatan vokasi baik pendidikan maupun pelatihan (Sa'idah & Muljanto, 2025). Hal serupa juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yaitu mengembangkan kemampuan pencari kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan sektor industri.

Berdasarkan data ketenagakerjaan tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 1.714.952 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang masuk dalam kategori bekerja mencapai 1.096.494 jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 76.063 jiwa. Data ini

menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk usia kerja di Sidoarjo telah terserap ke dalam lapangan pekerjaan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan pengangguran tetap menjadi isu strategis yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.



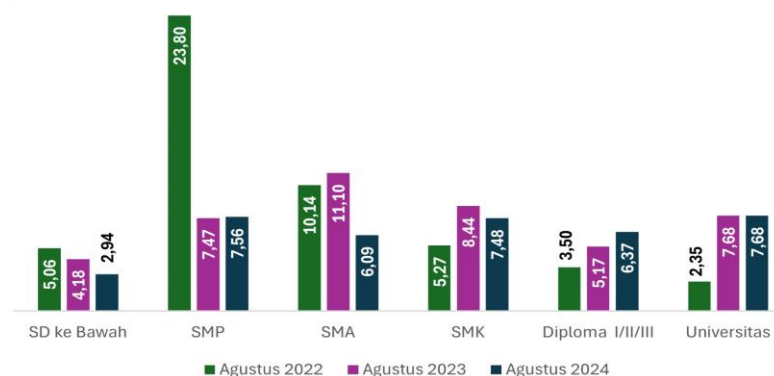
Gambar 1. 2 Jumlah TPT di Kabupaten Sidoarjo

Sumber : (BPS Sidoarjo, 2024)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Sidoarjo dalam tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022, TPT tercatat sebesar 8,80%, kemudian menurun menjadi 8,05% pada tahun 2023, dan kembali turun hingga 6,49% pada tahun 2024. Penurunan ini tidak hanya dilakukan oleh Disnaker saja tetapi menggandeng dinas koperasi dan UMKM dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk berkontribusi melalui program yang dibuat seperti *Job Matching* BKK (Bursa Kerja Khusus), program pelatihan berbasis kompetensi, program *Job Fair* dan Program Sosialisasi Regulasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) (Prafika & Kriswibowo, 2024). Meskipun demikian, angka 6,49% masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan rata-

rata TPT Jawa Timur yang hanya mencapai 4,19% pada tahun 2024. Hal ini menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakatnya. Lapangan kerja yang memadai merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Namun demikian, salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah tingginya angka pengangguran, terutama pengangguran terdidik (Sudarmi et al., 2020). Pengangguran terdidik atau *educated unemployment* merupakan fenomena ketika individu dengan kualifikasi pendidikan menengah hingga perguruan tinggi tidak terserap oleh pasar kerja. Fenomena ini menjadi kontradiktif, karena semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang seharusnya semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam kenyataannya, lulusan universitas justru menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam angka pengangguran terbuka di Sidoarjo.



Gambar 1. 3 TPT menurut Pendidikan Terakhir di Kabupaten Sidoarjo

Sumber : (BPS Sidoarjo, 2024)

Gambar 1.3 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan variasi yang cukup signifikan apabila ditinjau dari jenjang pendidikan terakhir. Pada tahun 2022, TPT tertinggi justru berasal dari lulusan SMP sebesar 23,80%, diikuti lulusan SMA sebesar 10,14%, dan SMK sebesar 5,27%. Sementara itu, TPT terendah terjadi pada lulusan Diploma sebesar 3,50% dan lulusan Universitas sebesar 2,35%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, terjadi perubahan pola. Pada 2023, lulusan SMK menjadi penyumbang TPT tertinggi dengan 8,44%, diikuti lulusan SMA sebesar 11,10%, dan lulusan SMP sebesar 7,47%. Sementara itu, lulusan universitas mulai menunjukkan kenaikan TPT, yakni 7,68%, dan Diploma mencapai 5,17%. Kondisi ini berlanjut hingga 2024, di mana TPT lulusan universitas tetap berada pada angka 7,68%, yang berarti lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah (2,94%) maupun lulusan SMA (6,09%). Hal ini menjadi fenomena penting karena menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan tidak selalu menjamin peluang kerja yang lebih besar (Sudarmi et al., 2020).

Fenomena yang menarik adalah bahwa pengangguran tidak hanya didominasi oleh kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah, tetapi juga justru banyak berasal dari kalangan terdidik, termasuk lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya paradoks, di mana pendidikan tinggi yang diharapkan menjadi modal untuk mendapatkan pekerjaan ternyata tidak selalu mampu menjamin penyerapan tenaga kerja (Hisyam et al., 2025). Ketidaksinkronan yang substansial antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja telah memunculkan fenomena ketidaksesuaian kualifikasi (*mismatch*) tenaga kerja di Indonesia, yang

tercermin dari tingginya proporsi pekerja yang tidak bekerja sesuai bidang keahliannya mencapai 63% serta diperparah oleh keterbatasan peluang kerja dan ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan posisi tersedia, sehingga meningkatkan tingkat persaingan dan berkontribusi terhadap munculnya pengangguran terbuka (Ardhana et al., 2025).

Tabel 1. 3 Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Tahun 2023
Tarik	2
Prambon	13
Kremlung	18
Porong	13
Jabon	13
Tanggulangin	43
Candi	54
Tulangan	20
Wonoayu	52
Sukodono	40
Sidoarjo	123
Buduran	103
Sedati	22
Waru	217
Gedangan	185
Taman	159
Krian	70
Balombendo	56
Kabupaten Sidoarjo	1.203

Sumber : (BPS Sidoarjo, 2023)

Industri adalah tempat untuk mengelola bahan mentah atau barang setengah jadi agar memiliki nilai tambah (Binus.ac.id, 2021). Berdasarkan tabel diatas yang dimaksud Industri skala menengah merupakan jenis usaha yang mempekerjakan sekitar 20 sampai dengan 99 tenaga kerja (usaha konveksi, industri bordir, dan industri keramik) yang memiliki karakteristik utama industri ini antara lain didukung oleh modal yang relatif memadai, pekerja yang memiliki keahlian tertentu

sesuai bidangnya, serta pengelola atau pimpinan usaha yang mempunyai kompetensi manajerial sedangkan industri skala besar adalah kegiatan industri yang melibatkan lebih dari 100 orang tenaga kerja dengan kepemilikan modal yang sangat besar, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, serta pimpinan perusahaan yang ditetapkan melalui proses seleksi berbasis uji kelayakan dan kompetensi seperti industri tekstil, industri besi dan baja, serta industri pesawat terbang (Disnaker Kebumen, 2022).

Total industri besar-sedang yang ada di Sidoarjo pada tahun 2023 adalah 1.203 yang tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Sidoarjo. Kemudian muncul kesenjangan berupa tingginya perusahaan industri di Kabupaten Sidoarjo namun tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal sehingga Sidoarjo tetap menjadi daerah nomor satu dengan TPT tertinggi se Jawa Timur. Sebagai upaya menekan pengangguran lokal, pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan minimal 30% tenaga kerja yang merupakan penduduk Kabupaten Sidoarjo dan memiliki kartu identitas (KTP) setempat (Octaziano & Hardjati, 2024).

Selain itu, hasil penelitian “Faktor dan Strategi Penanggulangan Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi” oleh Nur (2021) menjelaskan bahwa tenaga kerja masih memiliki keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri hal tersebut sejalan dengan isu strategis yang telah dipetakan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 bahwa kualitas kemampuan pencari kerja dalam menghadapi tantangan persaingan global masih kurang yang menyebabkan angka pengangguran

terdidik masih tinggi. Menurut Octaziano & Hardjati, (2024) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa program untuk menanggulangi masalah pengangguran seperti *job matching*, *job fair*, dan konsultasi karir dilakukan namun pada lulusan perguruan tinggi pada tahun 2024 menjadi peringkat pertama TPT di Sidoarjo, sejalan dengan penelitian “Evaluasi Job Fair dalam Penanggulangan Tingkat Pengangguran di Kota Bekasi” oleh (Juventia & Rahmawati, 2022) bahwa program *job fair* kurang efektif karena beberapa kendala seperti terbatasnya sosialisasi dan informasi yang tersedia, serta tidak sepadannya jumlah pencari kerja dengan lowongan pekerjaan

Munculnya *mismatch* antara kebutuhan industri dengan lulusan perguruan tinggi menjadi penyumbang terbesar TPT pada tahun 2024. Kemudian Disnaker membuat program pelatihan yang sesuai dengan peluang kerja di Sidoarjo. Pelatihan yang disediakan Disnaker Sidoarjo berdasarkan pada postingan akun instagram @disnakersidoarjo adalah pelatihan barista, spa bayi, spa refleksiologi, pelatihan pastry, K3 umum, menjahit dan forklift untuk menekan jumlah pengangguran. Peserta yang telah lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikat pelatihan dari Disnaker Sidoarjo sedangkan yang belum lulus akan memperoleh sertifikat keikutsertaan dari Disnaker (Kabar Panji, 2025). Meskipun pengangguran Sidoarjo menurun tetapi tetap menjadi pengangguran tertinggi se Jawa Timur yang menyebabkan perlu diketahui bagaimana responsivitas dari Disnaker untuk mengatasi masalah tersebut. Karena setelah diadakannya pelatihan belum ada

tindak lanjut dari Disnaker maupun industri untuk memastikan bahwa alumni program pelatihan terjamin dalam mencari pekerjaan (Octaziano & Hardjati, 2024).

Masyarakat terutama lulusan perguruan tinggi juga mengungkapkan beberapa keluhannya di kolom komentar instagram @disnakersidoarjo dan @ini_surabaya mengungkapkan bahwa syarat mencari kerja saat ini cukup sulit untuk dipenuhi tetapi gaji yang diberikan tidak sesuai atau dibawah UMR Sidoarjo. Salah satu komentar dari postingan @disnakersidoarjo menyatakan bahwa:

“Fresh Graduate max umur 24? Hmmm. Pakem banget aturan, padahal kita juga asli Sidoarjo loh, ga bisa dihilangin aja batasan umur buat asli domisili? Setahu saya kemarin aturan umur dihapus” (akun IG @inik.kikuk_, 2025)

Selain itu, dalam postingan di akun @ini_surabaya yang memposting tentang ucapan Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia yang menyebutkan bahwa anak muda saat ini terlalu memilih-milih pekerjaan menuai berbagai komentar salah satunya:

“Bapak ibu yang sangat terhormat kita semua kalah ambe wong jero, lek gk onok wong jero ketabrak, usia maximal 30thn, tinggi badan minimal, berat badan proposional, pengalaman minimal 3thn, dapat menguasai element, bersedia kerja lembur dan ditampatkan di kutup utara TAPI GAJI GUYON WATON” (akun IG @harjoe.k, 2025)

Keluhan tersebut mencerminkan rendahnya kepuasan pengguna layanan ketenagakerjaan. Harapan dari masyarakat, seperti Saiful (27) berharap supaya mendapatkan pekerjaan karena sejak lulus S1 tiga tahun yang lalu dia kerap berganti pekerjaan karena berstatus pekerja alih daya (Astuti, 2025). Dalam perspektif pelayanan publik kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur utama kualitas pelayanan publik, yang ditentukan oleh sejauh mana penyelenggara layanan bersikap responsif dan bertanggung jawab (Lestari *et al.*, 2025).

Mengatasi pengangguran pemerintah pusat memberikan solusi berupa diadakannya program magang nasional di tahun 2025 untuk lulusan Diploma dan Sarjana yang lulus maksimal satu tahun terakhir. Program magang ini dilaksanakan dengan kurun waktu selama enam bulan dan mendapatkan uang gaji sesuai UMR setempat. Program ini memang positif, tetapi belum menysar masalah ketidaksesuaian syarat kerja dan ketimpangan gaji yang menjadi keluhan utama masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah ketika enam bulan berlalu apakah masyarakat yang mengikuti program ini kembali menganggur dan mencari pekerjaan atau langsung direkrut menjadi pegawai tetap di tempat pemagangan.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 menunjukkan bahwa berbagai program telah dilaksanakan dan diklaim mencapai target kinerja, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang berbeda. Dalam laporan tersebut, Disnaker Sidoarjo menyampaikan bahwa program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berhasil dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja terlatih. Selain itu terdapat pula program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, serta program pembangunan kawasan transmigrasi yang secara administratif dinyatakan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Namun demikian, capaian administratif tersebut tidak berbanding lurus dengan situasi ketenagakerjaan aktual di Kabupaten Sidoarjo. Menurut (Permatasari, 2020) dalam teori evaluasi kebijakan publik, pencapaian program

tidak hanya ditentukan oleh realisasi kegiatan, tetapi dari dampaknya terhadap permasalahan sosial yang ditangani. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keberhasilan program pada level dokumen perencanaan dan realisasi capaian di lapangan. Bahkan, kelompok pengangguran dengan proporsi tertinggi berasal dari lulusan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran tidak hanya terjadi pada tenaga kerja berpendidikan menengah, tetapi juga pada tenaga kerja terdidik yang idealnya memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik dalam pasar kerja.

Kesenjangan antara capaian program Disnaker sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan kondisi empiris tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan, khususnya dalam menjawab persoalan pengangguran struktural di kalangan lulusan sarjana. Gap empiris inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana respons dan peran Disnaker Sidoarjo dalam menangani persoalan pengangguran, terutama yang dialami oleh lulusan perguruan tinggi.

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, yang menetapkan penciptaan 100.000 lapangan pekerjaan baru sebagai prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2021 hingga 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru sebanyak 137.776 tetapi dari total angka tersebut tenaga kerjanya adalah lulusan SMA (sidoarjonews, 2025). Kurangnya penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu

penyebab TPT lulusan perguruan tinggi menjadi angka paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024. Amanat tersebut tentunya menempatkan Disnaker sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan koordinasi lintas sektor untuk mencapai target tersebut. Hal ini sejalan dengan fungsi Disnaker sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022, yaitu:

- a) merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas program yang dilaksanakan;
- d) menyelenggarakan administrasi dinas; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Dwiyanto (2002), organisasi publik yang responsif ditandai oleh kemampuan menangkap keluhan masyarakat, memberikan respons yang cepat dan tepat, memanfaatkan keluhan untuk perbaikan layanan, memberikan kepuasan, serta menempatkan pengguna sesuai sistem pelayanan yang berlaku. Namun ketika konsep tersebut dikaitkan dengan pelayanan Disnaker Sidoarjo terhadap tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi, tampak adanya ketidaksesuaian antara norma teori dan realitas lapangan.

Permasalahan adanya perbedaan keterampilan lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan sektor industri saat ini yang menyebabkan pengangguran lulusan perguruan tinggi. Adanya beberapa program untuk mengatasi pengangguran tidak dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran lulusan

perguruan tinggi di Kabupaten Sidoarjo (Octaziano & Hardjati, 2024). Sehingga diperlukan untuk mengetahui bagaimana responsivitas Disnaker Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pengangguran lulusan perguruan tinggi. Aparat seharusnya memberikan respons yang sesuai kebutuhan spesifik pencari kerja. Di sisi lain, keluhan yang disampaikan tidak secara konsisten digunakan sebagai bahan evaluasi program, sehingga jenis pelatihan yang disediakan lebih banyak berbasis vokasional dasar dan belum menjawab kebutuhan kompetensi sarjana di sektor industri modern. Dengan demikian, terdapat gap empiris yang jelas antara teori responsivitas Dwiyanto dan kondisi pelayanan Disnaker Sidoarjo.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dibutuhkan analisa lebih lanjut untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana responsivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi permasalahan pengangguran lulusan perguruan tinggi untuk menekan atau mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun penelitian terkait pengangguran telah banyak dikaji, tetapi penelitian ini lebih diarahkan pada pengkajian responsivitas Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi permasalahan lulusan perguruan tinggi menjadi TPT paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo sehingga hal tersebut menjadi suatu kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini. Sehingga, peneliti menggunakan teori responsivitas oleh Dwiyanto et al., (2002) menggunakan lima elemen yaitu “keluhan dari pengguna jasa, sikap aparat birokrasi, perbaikan penyelenggaraan pelayanan, tindakan aparat birokrasi, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku”.

Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana respons dan langkah Disnaker Sidoarjo dalam menjalankan fungsi-fungsinya, serta apakah program yang telah dirancang dan dilaksanakan benar-benar mampu mengatasi tingginya pengangguran, terutama pada kelompok lulusan perguruan tinggi yang justru menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024. Latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dan judul **“Responsivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Menanggulangi Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini menetapkan permasalahan sebagai bagaimana responsivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pengangguran lulusan perguruan tinggi?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis responsivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pengangguran lulusan perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai teori responsivitas birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas sumber pustaka di lingkungan universitas, serta menjadi rujukan bagi kajian dan penelitian yang relevan.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan responsivitas dalam merumuskan kebijakan dan program ketenagakerjaan, terutama yang berfokus pada pengurangan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai berbagai program dan peluang kerja yang tersedia, sekaligus mendorong kesiapan masyarakat, khususnya lulusan perguruan tinggi, dalam menghadapi persaingan di dunia kerja.

4. Bagi Peneliti

a. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Penelitian ini juga memberikan pengalaman akademik dan menambah pengetahuan mengenai responsivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pengangguran lulusan perguruan tinggi dengan memadukan teori dan praktik lapangan.